

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat (Abdullah:2011). Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu bahkan dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan yang diatur oleh norma yang berlaku.

Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu kepemimpinan atau leader) untuk memengaruhi orang lain tersebut bertingkah-laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadang kala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala Tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. (Soerjano:2013).

Dalam rangka menciptakan *good governance* disuatu negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasannya kepada swasta dan

masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil posisi yang tepat dalam pembangunan.

Banyak sumber daya alam yang ada di desa dapat diolah masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat seperti bagaimana cara pengolahannya, pemasaran hasilnya sehingga masyarakat kebingungan untuk memasarkan hasilnya. Dalam hal ini kepala desa memegang peranan penting sebagai pemimpin di desa dalam hal mengupayakan peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan motivasi maupun dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya dan lain sebagainya untuk menunjang peningkatan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Desa sebagai unit pemerintahan terendah merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah. Kegagalan program ditingkat desa akan membawa dampak bagi kegagalan program pemerintahan di atasnya juga.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat

perlu di kembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Masyarakat miskin memiliki ciri ketidakberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Secara ekonomi jelas masyarakat miskin berada diatas atau dibawah ambang kemampuan materi untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal yang diperlukan sebagai manusia wajar.

Kemiskinan sosial, tampak nyata bahwa masyarakat miskin memiliki banyak keterbatasan di lingkungan sosialnya, baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi secara vertikal bahkan untuk menjalin jaringan keluar dari lingkungannya. Secara kultural masyarakat miskin biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak setara dan dipandang paling bawah dalam segmentasi atau struktur sosial. Secara politis masyarakat miskin tidak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang di berlakukan diwilayahnya, bahkan kebijakan yang mengintervensi di banyak segi kehidupan mereka sekalipun. Masih banyak masalah-masalah yang perlu di benahi:

1. Kemiskinan pedesaan

Kemiskinan Pedesaan (rural poverty), merupakan salah satu topik pokok yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pembangunan pertanian dan pedesaan, terlebih di negara-negara sedang berkembang yang sebagian besar

penduduknya tinggal didaerah pedesaan, yang umumnya dalam belunggu kemiskinan dengan pertanian sebagai basis ekonominya.

2. Kesempatan Kerja

Kiranya tidak dapat dibantah lagi bahwa kesempatan kerja merupakan masalah penting. Pertambahan angkatan kerja yang cepat pun membawa dampak bagi pengangguran. Dalam kaitan ini, sektor pedesaan dengan sifat ekonominya yang belum terlalu komersial finansial dapat dihadapkan mampu mengurangi beban ledakan tersebut dengan menampung sebagian pencari kerja. Urbanisasi misalnya, merupakan dampak negatif terjadinya ledakan angkatan kerja dipedesaan. Daya serap perekonomian desa memang terbatas. Dengan terbatasnya kesempatan kerja dipedesaan, ditambah meningkatnya mobilitas penduduk, mendorong terjadinya proses urbanisasi tersebut. Implikasinya salah satu yang jelas, apabila sektor pedesaan dan pertanian diharapkan mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja adalah adanya keharusan pemerintah untuk menambah basis ekonomi desa.

3. Sifat hubungan impersonal

Proses pembangunan dengan segala aspek kemurniannya, telah membawa sifat hubungan ekonomi dan sosial yang semula bersifat informal non-komersial menjadi formal komersial. Transaksi yang semula dilakukan secara barter menjadi bercorak finansial. Hubungan ekonomi yang demikian itu pada akhirnya memerlukan penyesuaian dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, pada akhirnya secara cermat mengikatkan diri pada bentuk ikatan hubungan yang semakin kompleks. Lebih pasti hak dan kewajibannya, menuju ke sifat

hubungan impersonal. Implikasi dari makna formal komersialnya hubungan ekonomi di pedesaan, dan yang sekaligus merupakan tantangan pembangunan adalah bagaimana mempersiapkan para petani dalam menghadapi transaksi yang impersonal tadi. Barang kali pendidikan dan penyuluhan mengenai ekonomi kerumah tanggaan, keuangan, dan sejenisnya merupakan beberapa bentuk alternatif usaha yang perlu dipikirkan.

4. Intervensi kebijakan

Pada intinya basis bagi pelaksanaan pembangunan pedesaan meliputi dua hal. Yang pertama, sumberdaya alam yang tersedia, dan yang kedua sumberdaya manusia yang akan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam memberikan basis ekonomi yang nantinya dapat diolah dan dikembangkan. Sumberdaya manusia tentunya akan mempengaruhi cara dan intensitas pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia tadi. Kedua sumberdaya ini tentunya kondisinya tidak sama antar daerah dan tidak selamanya mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia secara terus-menerus. Karena itulah kiranya perlunya dilakukan intervensi kebijakan pemerintah, baik yang ditujukan kepada sumber daya alamnya maupun manusianya.

Proses pembangunan memang membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi sektor pedesaan. Konsekuensi demikian ini dapat dipandang sebagai problem sekaligus tantangan pembangunan pedesaan terlebih sekarang ini untuk memasuki pasar bebas. Tantangan-tantangan itu pasti akan selalu

berubah, baik dilihat dari segi intensitasnya maupun dimensi masalahnya yang kesemuanya perlu dicarikan jalan keluarnya.

Oleh karena itu dalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Adapun masyarakat yang perlu diberdayakan antara lain adalah kaum buruh, petani, orang miskin kota dan orang miskin desa.

Dalam konteks tersebut diatas maka beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Kabupaten TTU melalui dinas sosial adalah peningkatan ekonomi rakyat yang bermuara pada kemandirian dan kesejahteraan sosial dengan pola Kelompok Usaha Bersama.

Penyebaran program penanggulangan kemiskinan dengan pola Kelompok Usaha Bersama dapat menjangkau beberapa Desa di Kabupaten TTU adalah

peningkatan ekonomi Rakyat yang bermuaran pada kemandirian dan kesejahteraan sosial dengan pola Kelompok Usaha Bersama.

Pengebar program penanggulangan kemiskinan dengan Kelompok Usaha Bersama sudah dapat menjangkau beberapa desa di Kabupaten TTU. Salah satu desa yang dijadikan sasaran adalah Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah.

Secara umum data kemiskinan Di Desa Nimasi selam 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021) dapat dilihat dari jumlah penerimaan bantuanyang sebelumnya disebut raskin dan rastra. Berdasarkan data pada Dinas sosial Kabupaten TTU, maka data kemiskinan khusus untuk Desa Nimasi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah KK Miskin Di Desa Nimasi

No	Tahun	Jumlahkepala keluarga	Jumlah KK kemiskinan
1	2019	220	130
2	2020	222	120
3	2021	228	115
Total		670	365

Sumber Data: Kantor Desa Nimasi, 2022

Perubahan data kemiskinan DiDesa tersebut diakibatkan karena penambahan jumlah kepala keluarga baru yang masih tergolong sebagai keluarga miskin. Berdasarkan data kemiskinan tersebut diatas, maka dibentuklah Kelompok Usaha Bersama sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Nimasi sehingga dapat memanfaatkan dana bantuan yang dikucurkan untuk pengembangan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa secara empirik pengembangan ekonomi rakyat melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Nimasi dapat berjalan cukup baik. Namun terdapat beberapa persoalan teknis yang dialami oleh kelompok sasaran. Beberapa fakta yang dapat dilihat misalnya: 1) dalam hal administrasi kelompok, belum dilakukan secara professional; 2) adanya rasa kecemburuan dalam masyarakat, karena penetapan kelompok pemanfaat program masih didasarkan pada penilaian subyektif; 3) dukungan dana yang relative yang kecil sehingga tidak menjangkau semua kelompok yang ada; 4)kelalaian dari kelompok dalam pengambilan dana pinjaman sesuai batas waktu yang ditentukan

Berdasarkan hasil pengamatan awal juga diketahui bahwa ada 2 kelompok usaha Bersama di Desa Nimasi. Ke-2 kelompok tersebut dengan usaha yang bervariasi sebagaimana terlihat pada table 1.2 dibawa ini.

Tabe1.2
Data Kelompok Usaha Bersama Di Desa Nimasi

No	Jenis Usaha	Jumlah Kelompok	Nama Kelompok	Anggaran RP	Keterangan
1	Industry rumah tangga (home industry)	2 kelompok	Moin feu	1.000.000	Tenun ikat
			Tok tabua	1.000.000	Tenun ikat

Sumber data: desa Nimasi, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa kelompok usaha Bersama (KUBE) desa Nimasi menjalankan usaha tenun, industry rumah tangga, ternak besar,dengan jumlah anggaran yang dikelolah sebesar 2.000.000 jumlah dana yang dimanfaatkan untuk usaha-usaha tersebut diatas disesuaikan dengan kebutuhan kelompok melalui proposal yang diusulkan.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang manfaat yang diperoleh masyarakat khususnya dalam Kelompok Usaha Bersama Di desa Nimasi, maka penulis ingin melakukan kajian ilmiah melalui suatu penelitian, dengan judul: **"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan permasalahan sebagai berikut: "Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) Di Desa Nimasi kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.?"

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten TTU.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep Administrasi publik, khususnya berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan pemberdayaan di desa lebih akurat oleh pemerintah desa.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi baru mengenai pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat oleh pemerintah Desa.
- c) Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan baru mengenai pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat oleh pemerintah Desa sehinga menjadi rujukan bagi peneliti lain.